# RENCANA KERJA

## 2024

## INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BANTEN

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan HidayahNya, bahwa kami telah dapat menyusun suatu dokumen perencanaan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2024.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 adalah suatu dokumen yang akan menjadi acuan bagi pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Banten sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

Selanjutnya kami mengharapkan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi Banten dalam rangka meningkatkan kegiatan Pengawasan secara tepat dan terarah.

Rencana Kerja ini memberikan gambaran dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2024 dengan tercapainya arah kebijakan pembangunan dibidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah daerah.

Serang, Juli 2023

**Plt. INSPEKTUR DAERAH**
**PROVINSI BANTEN,**

**Dr. Ir. MOCH. TRANGGONO, M.Sc.**
**NIP. 19631210 199003 1 005**

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR** ..... **i**
**DAFTAR ISI** ..... **ii**

**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**
1.1. LATAR BELAKANG ..... 1
1.2. DASAR HUKUM ..... 3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN ..... 5
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN RENJA ..... 6

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2022 DAN RENJA PERUBAHAN TAHUN 2023** ..... **8**
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD ..... 8
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ..... 20
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH ..... 29
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD ..... 32
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT ..... 41

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN** ..... **42**
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL ..... 42
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH ..... 42
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN ..... 44

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN** ..... **60**

**BAB V PENUTUP** ..... **66**

**LAMPIRAN**

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Rencana Kinerja merupakan dokuman yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berpedoman kepada Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah serta RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

Dalam Amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan Pemilu Kepala Daerah serentak secara Nasional pada Tahun 2024. Diteruskan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021, tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Dimana Pemerintah Provinsi Banten sebagai salah satu Provinsi yang diwajibkan menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, akan digunakan sebagai dokumen masa transisi sebagai pengganti RPJMD 2017-2022 saat berakhirnya masa Kepala Daerah. Setelah adanya Dokumen RPD 2023-2026 Provinsi Banten dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 2023-2026 kedua dokumen tersebut telah ditetapkan oleh Kepala Daerah

maka diwajibkan kepada semua Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 merupakan dokumen resmi yang disusun Inspektorat Daerah Provinsi Banten sebagai pedoman dan arah penyelenggaraan pengawasan di lingkungan pemerintahan Provinsi Banten.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2024 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, selanjutnya Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Banten digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana kerja Anggaran (RKA) Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 sebagai tahapan penyusunan Rancangan APDB (RAPBD) Provinsi Banten Tahun 2024.

Inspektorat Daerah Provinsi Banten memiliki peranan dan fungsi yang cukup strategis dalam menjaga dan mengawal akuntabilitas Pemerintah Provinsi Banten. Akuntabilitas sebagai perwujudan tanggungjawab atas pengelolaan sumber daya yang ada di Pemerintah Provinsi Banten harus dikelola dan dijaga agar dapat mewujudkan *Good Governance* menuju *Clean Governance* pada Pemerintah Provinsi Banten.

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Provinsi Banten berfungsi sebagai acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada tahun bersangkutan. Rencana Kerja Inspektorat merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan rencana strategis (RENSTRA) Perubahan Inspektorat.

## 1.2 Landasan Hukum

Dasar Penyusunan Renja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Infentarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 – 2025(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
14. Peraturan Gubernur No 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
15. Peraturan Gubernur No 4 Tahun 2022 tentang Renstra 2023-2026;
16. Peraturan Gubernur No 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bnaten tahun 2024.

## 1.3 Maksud Dan Tujuan

### A. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 dimaksudkan untuk melanjutkan menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang ada pada Renstra Perubahan Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2023–2026 kedalam rencana program, kegiatan dan penganggaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ditetapkan. Lebih jauh lagi penyusunan Renja Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 sebagai acuan dan pedoman bagi Inspektorat dalam rangka merumuskan program kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi serta sebagai upaya mengimplementasikan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Banten dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2024.

### B. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 adalah:

1) Menyediakan acuan /pedoman resmi dalam menyusun dan mensinkronkan seluruh rencana pembangunan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten;
2) Untuk mengidentifikasi rencana pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Banten tahun 2024 berdasarkan kebijakan, evaluasi periode sebelumnya, permasalahan obyektif yang dihadapi, rencana kinerja, rencana biaya serta lokasi dan kelompok sasaran.
3) Menyediakan tolok ukur untuk penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan;
4) Menjadi dasar acuan penyusunan kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Banten;

5) Memberikan pedoman kepada Inspektorat Daerah Provinsi Banten dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya;

6) Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Inspektorat Daerah Provinsi Banten yang dapat diukur dan dievaluasi secara objektif.

## 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN RENJA INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

Sistematika penulisan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan**

Bab awal ini akan mengemukakan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

**BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

Memuat informasi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

**BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Pada bab ini memuat tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.

**BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Bab ini menguraikan tentang rencana kerja beserta pendanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2024.

**BAB V Penutup**

Bab ini merupakan berisikan penutup Renja Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2024.

# BAB II
# HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

## 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Provinsi Banten mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Fungsi bagian pembinaan dan pengawasan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan kinerja Inspektorat khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan entitas seluruh unit kerja dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi yang sesuai dengan tata pemerintahan yang baik *(Good Governance).*

Fungsi pembinaan dan pengawasan merupakan bagian tak terpisah dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja Inspektorat khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh entitas unit kerja dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata pemerintahan yang baik (good governance). Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayaan publik dan pemberantasaan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata pemerintah masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Sehingga penyelarasan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan, diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan, sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini (early warning system) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan yang terjadi, disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.

Pada review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Provinsi Banten dari tahun 2019 sampai dengan 2021 dapat terlihat adanya perbedaan sasaran serta program kegiatan di tahun 2019-2020 dengan program kegiatan di tahun 2021-2022. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Pencapaian Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | **FUNGSI PENUNJANG PENGAWASAN** | | | | | | | | | |
| 3 0 2 0 1 | Program Tata Kelola Pemerintah | Meningkatnya pelayanan perkantoran | | | | | | | | |
| | Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset | Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | | 100% | | | | | | |
| | Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | Capaian kesesuaian dengan parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah | | 100% | | | | | | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase sarana prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah | | 100% | | | | | | |
| | Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Administasi kepegawaian perangkat daerah | Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang akan mendukung tugas dan fungsi SKPD | | 100% | | | | | | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Indikator Kinerja Program : Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | | | | | | | | |
| | | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase ketercapaian kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah | 100% | | 100% | 66.7% | 66.7% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase ketercapaian kegiatan Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | 100% | | | | | | | |
| | | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | 33% | 33% |
| | | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase ketercapaian kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerinthan Daerah | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | 89% | 89% |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Meningkatnya kualitas pengawasan | - | | | | | | | |
| | | | | | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Capaian Pengawasan Internal Bidang Pendapatan | - | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| | | | | | | Capaian Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah | - | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| | | | | | | Capaian Pengawasan Internal Bidang Perencanaan Pembangunan dan Kepegawaian Daerah | - | 100% | 100% | 151% | 151% | | | |
| | | | | | | Persentase Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten | - | 100% | 100% | 98% | 98% | | | |
| | | | | | | Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI | - | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| | | | | | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Persentase Capaian Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | - | 100% | 100% | 177% | 177% | | | |
| | | | | | | Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah | - | 100% | 100% | 200% | 200% | | | |
| | | | | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Persentase Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan | | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| | | | | | Pendampingan dan Asistensi | | | | | | | | | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Indikator Kinerja Program : Persentase ketercapaian Penyelenggaraan Pengawasan | | | | | | | | |
| | | | | | | Indikator Kinerja Program : Persentase Jumlah Temuan yang telah ditindaklanjuti | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Persentase ketercapaian Kegiatan penyelenggaraan Pengawasan Internal | 100% | | 100% | | | | | |
| | | | | | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 100% | | 100% | | | | | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Indikator Kinerja Program : Persentase ketercapaian perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi | | | | | | | | |
| | | | | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Persentase ketercapaian Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | 100% | | 100% | | | | | |
| | | | | | Pendampingan dan Asistensi | Persentase ketercapaian Kegiatan Pendampingan dan Asistensi | 100% | | 100% | | | | | |

Terkait dengan Rencana Kerja Inspektorat Daerah tahun 2022 pada umumnya realisasi program kegiatan telah tercapai sesuai dengan target penyerapan anggaran maupun target kinerja yang telah ditentukan, walaupun masih terdapat program kegiatan yang capaiannya tidak 100%.

Evaluasi capaian atas pelaksanaan Rencana kerja Inspektorat Daerah Provinsi Banten tahun 2022 dan prakiraan yang dijabarkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.2 Pencapaian Realisasi kinerja Tahun 2022

| No | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) /Keluaran (output) | Target kinerja capaian program Tahun 2022 | Realisasi target kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2022 | Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja SKPD Tahun 2022 | Realisasi Renja SKPD tahun 2022 | Tingkat Realisasi % |
| I | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD** | **85** | **80.85** | **85** | **80.85** | **95.13%** |
| 1. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terwujudnya akuntabilitas penata usaha keuangan yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah | 100% | 100% | 100% | 80.5% | 80.5% |
| 5. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | |

| No | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) /Keluaran (output) | Target kinerja capaian program Tahun 2022 | Realisasi target kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2022 | Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja SKPD Tahun 2022 | Realisasi Renja SKPD tahun 2022 | Tingkat Realisasi % |
| 6. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | |
| 7. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | |
| II | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | **Nilai Maturitas SPIP** | **Nilai 4** | **Nilai 3** | **Nilai 4** | **Nilai 3** | **75%** |
| 1. | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Capaian Pengawasan Internal Bidang Pendapatan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Capaian Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Capaian Pengawasan Internal Bidang Perencanaan Pembangunan dan Kepegawaian Daerah | 100% | 151% | 100% | 151% | 151% |
| | | Persentase Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten | 100% | 98% | 100% | 98% | 98% |
| | | Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Persentase Capaian Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 100% | 177% | 100% | 177% | 177% |

| No | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) /Keluaran (output) | Target kinerja capaian program Tahun 2022 | Realisasi target kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2022 | Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja SKPD Tahun 2022 | Realisasi Renja SKPD tahun 2022 | Tingkat Realisasi % |
| | | Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah | 100% | 200% | 100% | 200% | 200% |
| III | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | **Level Kapabilitas APIP** | **Level 4** | **Level 3** | **Level 4** | **Level 3** | **75%** |
| 1. | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Persentase Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Pendampingan dan Asistensi | | | | | | |

Program prioritas yang ada pada Inspektorat Daerah Provinsi Banten berfokus pada urusan pengawasan dengan prioritas program pengawasan dibidang internal yang berfokus kepada pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan baik itu yang berasal dari Inspektorat maupun dari BPK RI, disamping itu Inspektorat daerah Provinsi Banten juga memiliki program yang berfokus kepada pendampingan OPD, peningkatan kapabilitas APIP serta perumusan kebijakan yang berhubungan dengan pengawasan yang terangkum dalam program Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan.

Tabel. 2.3 Program Prioritas Perangkat Daerah

| NO | BIDANG URUSAN | PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH | |
|---|---|---|---|
| | | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 |
| 1 | Pengawasan | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Program Penyelenggaraan Pengawasan |
| | | Program Perumusan Kebijkan, pendampingan dan asistensi | Program Perumusan Kebijkan, pendampingan dan asistensi |

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran tingkat capaian kinerja pada Inspektorat Daerah provinsi Banten tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Banten dengan hasil realisasinya pada tahun 2022.

Adapun target capaian kinerja sasaran tahun 2022berdasarkan dokumen Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Banten sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon II maupun Indikator Kinerja Program Eselon III diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Target dan realisasi capaian kinerja masing-masing indikator sasaran Tahun 2022

| No | Sasaran Kinerja | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, efektif dan efisien | Capaian SAKIP | Nilai | 85 | 80.85 | 95.13% |
| 2. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pembangunan daerah | Capaian Maturitas SPIP | Level | 4 | 3 | 75% |
| | | Capaian level Kapabilitas APIP | Level | 4 | 3 | 75% |

Sesuai dengan tabel diatas dapat dijelaskan masih terdapat target kinerja sasaran dengan realisasinya dibawah 100%, yaitu indikator kinerja sasaran capaian maturitas SPIP serta indikator kinerja sasaran capaian kapabilitas APIP . Namun demikian jika dilihat dari capaian program dan kegiatan yang menunjang pada capaian target kinerja sasaran tersebut, menunjukan kondisi yang sebaliknya. Penjelasan terkait kondisi tersebut akan diuraikan kemudian melalui analisis penyebab peningkatan dan penurunan capaian kinerja pada sub bab berikutnya dalam dokumen ini. Capaian kinerja program dan kegiatan yang mendukung kinerja sasaran dan indikator kinerja utama dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Provinsi Banten

| Program | kegiatan | Indikator Kinerja Program | Satuan | Target | | | Realisasi | | | Capaian | | | Program | Kegiatan | Indikator Kinerja Program | Satuan | Target | | Realisasi | | Capaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
| **Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD** | | | **Nilai** | **70** | **75** | **80** | **70** | **75** | **87,67** | **100%** | **100%** | **109,6%** | **Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD** | | | **Nilai** | **85** | **85** | **77.92** | **80.85** | **91.67%** | **95.13%** |
| **Program Tata kelola Pemerintahan** | Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan | Terselenggaranya Perencanaan dan Pelaporan Secara Optimal | persen | 100% | 100% | 100% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah | persen | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Tersedianya data informasi pembangunan daerah | persen | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 100% | 100% | 98% | 100% | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Capaian pengelolaan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan | persen | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset | Terlaksananya Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan | persen | 100% | 100% | 100% | 96% | 100 % | 96% | 96% | 100% | 96% | | Administrasi kepegawaian perangkat daerah | Capaian kompetensi Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah | persen | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran | Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana kantor | persen | 100% | 100% | 100% | 96% | 98% | 96% | 96% | 98% | 96% | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Capaian dukungan sarana prasarana administrasi perkantoran pada Perangkat Daerah | persen | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Kantor Secara Berkala | persen | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 98% | 100% | 95% | 98% | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | persen | 100% | 100% | 100% | 33% | 100% | 33% |
| | | Meningkatnya Kuantitas Sarana dan Prasaran Kantor | persen | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | persen | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Peningkatan koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah | persen | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % | 96% | 100% | 100% | 96% | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | persen | 100% | 100% | 100% | 89% | 100% | 89% |
| | Peningkatan Kapasitas Aparatur | Meningkatnya Kopetensi Sumber Daya Aparatur Pengawasan | persen | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | | | | | | | | | | |
| | Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan pelayanan perpustakaan | Terkelolaanya arsip dan pengadaan buku perpustakaan | persen | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | | | |
| **Capaian Maturitas SPIP** | | | **Level** | **-** | **3** | **3** | **-** | **3** | **3** | **-** | **100%** | **100%** | **Capaian Maturitas SPIP** | | | **Level** | **4** | **4** | **3** | **3** | **75%** | **75%** |
| **Capaian Kapabilitas APIP** | | | | **-** | **3** | **3** | **-** | **3** | **3** | **-** | **100%** | **100%** | | | | | | | | | | |
| **Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah** | Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan | Tersedianya Pedoman Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan serta SOP Pengawasan | persen | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% | **Penyelenggaraan Pengawasan** | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Capaian Pengawasan Internal Bidang Pendapatan (Satuan: %) | persen | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Itjen kementerian | Meningkatnya Koordinasi Dalam Penyelesaian Temuan Hasil Pemeriksaan | persen | 100% | 100% | 100% | 90% | 92% | 90% | 90% | 92% | 90% | | | Capaian Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah (Satuan: %) | persen | 100% | 100% | 100% | 220% | 100% | 220% |
| | Pengawasan Internal Bidang Pendapatan | Meningkatknya Pengawasan Internal Bidang Pendapatan Provinsi Banten | persen | 100% | 100% | 100% | 92% | 95% | 96% | 92% | 95% | 96% | | | Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah (Satuan: %) | persen | 100% | 100% | 100% | 1086 % | 100% | 1086% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Korupsi dilingkungan Provinsi Banten | Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal terhadap Penyimpangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerh | persen | 100% | 100% | 100% | 98% | 100 % | 95% | 98% | 100% | 95% | | | Capaian Pengawasan Internal Bidang Perencanaan Pembangunan dan Kepegawaian Daerah (Satuan: %) | persen | 100% | 100% | 100% | 126% | 100% | 126% |
| | Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah | Meningkatnya Pengawasan Pengelolaan Bidang Belanja Barang dan jasa dan Bantuan Keuangan daerah | persen | 100% | 100% | 100% | 90% | 82% | 98% | 90% | 82% | 98% | | | Persentase Capaian Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Satuan: %) | persen | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 95% |
| | Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah | Meningkatnya Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah | persen | 100% | 100% | 100% | 82% | 82% | 90% | 82% | 82% | 90% | | | Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI (Satuan: %) | persen | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Pengawasan dan Pengendalian Internal terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | persen | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 98% | 90% | 90% | 98% | **Capaian Level Kapabilitas APIP** | | | **Level** | **3** | **4** | **3** | **3** | **100%** | **75%** |
| | | | | | | | | | | | | | **Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi** | | Persentase Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan (Satuan: %) | persen | 100% | 100% | 100% | 267% | 100% | 267% |
| | Pengawasan dan Pengendalian Internal terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | persen | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 95% | 100% | 85% | 95% | | | | | | | | | | |

Pada tabel di atas menunjukan terdapat perubahan jumlah program dan perbedaan *crosscutting* antara sasaran kinerja dan program. Pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, terdapat dua sasaran kinerja yang diampu oleh satu program, sedangkan pada Tahun 2021, dua sasaran kinerja tersebut diampu oleh dua program. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan kebijakan terkait Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. SIPD merupakan sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah.

Adanya peraturan tersebut, berpengaruh besar terhadap nomenklatur perencanaan program dan kegiatan, sehingga diperlukan perubahan untuk memetakan kembali hubungan dan keselarasan antara sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan nomenklatur program dan kegiatan yang terdapat pada sistem tersebut.

Berdasarkan hasil Pemetaan, terdapat beberapa perubahan yaitu pada nomenklatur program dan indikator kinerjanya, yang awalnya hanya ada 2 program bertambah menjadi 3 dengan nama program yang berbeda dari nama program di tahun sebelumnya, yaitu menjadi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan indikator kinerjanya:
    a. Capaian kesesuaian dengan parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah
    b. Capaian pengelolaan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan;
    c. Capaian dukungan sarana prasarana adm. perkantoran pada Perangkat Daerah;

d. Capaian kompetensi Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

2. Program Penyelenggaran Pengawasan, dengan indikator kinerjanya :
   a. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI;
   b. Capaian Pengawasan Internal Bidang Pendapatan;
   c. Persentase Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten;
   d. Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah;
   e. Capaian Pengawasan Internal Bidang Perencanaan Pembangunan dan Kepegawaian Daerah;
   f. Persentase Capaian Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
   g. Capaian Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah
3. Program Pendampingan dan Asistensi, dengan indikator kinerjanya Persentase Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

Berikut adalah hasil evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran berikut keberhasilan dan kegagalannya melalui program, kegiatan dan yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Banten selama Tahun 2022.

**A. Capaian Sasaran 1, meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, efektif dan efisien**

Sasaran ke- 1 memiliki indikator kinerja utama yaitu capaian SAKIP, dengan target dan capaian sebagai berikut :

Target : Nilai 85
Realisasi : Nilai 80.85
Capaian : 95.13%

Sampai dibuatnya laporan ini, belum ada penilaian capaian SAKIP dari Inspektorat Daerah Provinsi Banten selaku evaluator internal SAKIP di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten.

Realisasi indikator kinerja sasaran capaian SAKIP merupakan hasil dari realisasi kinerja atas Program

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui indikator kinerjanya, yaitu :

a. Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah, dengan capaian sebesar 100%;
b. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah, dengan capaian sebesar 80,5%;
c. Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD, dengan capaian sebesar 100%;
d. Persentase terwujudnya akuntabilitas penata usaha keuangan yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD, dengan capaian sebesar 100%.

Berdasarkan realisasi atas 4 (empat) capaian indikator program, dapat dihitung besaran capaian program sebesar 95, yang merupakan hasil perhitungan dari rata-rata capaian indikator program.

Dari hasil capaian program tersebut, dapat dihitung realisasi pada indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

**Realisasi Indikator Kinerja Sasaran**

$$\frac{(\text{target indikator kinerja sasaran } x \text{ capaian program})}{100}$$

$$\frac{(85\,x\,95)}{100} = 80.75$$

Sehingga menghasilkan capaian indikator sasaran sebagai berikut :

**capaian indikator sasaran**

$$\frac{\text{Realisasi Indikator Kinerja Sasaran}}{\text{target}}\ x\ 100\%$$

$$\frac{(80.75)}{85}\ x\ 100\% = 95.13\%$$

Capaian Indikator kinerja pada sasaran ke-1 yang masih menujukan persentase serapan kegiatan dibawah 100% disebabkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
   a. Sesuai syarat pengajuan belanja barang terkait TKDN sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur No.9 tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan APBD tahun 2022 yang mengharuskan menggunakan E-Katalog Lokal dengan barang yang memiliki sertifikat TKDN, sehingga :
      1) Pengadaan Batik Kantor tidak terealisasi dikarenakan penyedia pada e-katalog tidak dapat mengeluarkan sertifikat TKDN;
      2) Beberapa produk pengadaan peralatan dan mesin tidak dapat terserap semuanya dikarenakan penyedia pada e-katalog tidak dapat mengeluarkan sertifikat TKDN.
2. Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
   a. Penyerapan Anggaran pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dan operasional disesuaikan dengan kondisi kerusakan/kebutuhan kendaraan;
   b. Penyerapan Anggaran pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya disesuaikan dengan kondisi kerusakan barang;
   c. Honorarium Konsultan Pengawas tidak terealisasi sepenuhnya dikarenakan perencanaan rehab gedung Inspektorat (belanja modal) tidak boleh direalisasikan;
   d. Adanya pengurangan nilai realisasi Pekerjaan Fisik Konstruksi pemeliharaan gedung.

## B. Capaian Sasaran 2, Meningkatnya Kualitas SPIP

Sasaran ke- 2 memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu capaian maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan capaian level kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

### B.1 IKU Pertama, Capaian Maturitas SPIP

Realisasi indikator kinerja sasaran capaian maturitas SPIP merupakan hasil dari realisasi kinerja atas Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan indikator kinerjanya, yaitu :

a. Capaian pengawasan internal bidang pendapatan, dengan capaian sebesar 100%;
b. Capaian pengawasan internal bidang belanja modal dan barang milik daerah, dengan capaian sebesar 220%;
c. Capaian pengawasan internal bidang perencanaan pembangunan dan kepegawaian daerah, dengan capaian sebesar 126%;
d. Persentase evaluasi hasil pembinaan dan pengawasan provinsi banten, dengan capaian sebesar 143%;
e. Persentase capaian pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi, dengan capaian sebesar 95%;
f. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan BPK RI, dengan capaian sebesar 100%;
g. Capaian pengawasan internal bidang barang-jasa dan bantuan keuangan daerah, dengan capaian sebesar 1086%;

Berdasarkan realisasi atas 7 (tujuh) capaian indikator program, dapat dihitung besaran capaian program sebesar 267.14% yang merupakan hasil perhitungan dari rata-rata capaian indikator program.

Dari hasil capaian program tersebut, dapat dihitung realisasi pada indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

**Realisasi Indikator Kinerja Sasaran**

$$\frac{(\text{target indikator kinerja sasaran } x \text{ capaian program})}{100}$$

$$\frac{(100\ x\ 267.14)}{100} = 267.14$$

Sehingga menghasilkan capaian indikator sasaran sebagai berikut :

**capaian indikator sasaran**

$$\frac{\text{Realisasi Indikator Kinerja Sasaran}}{\text{target}}\ x\ 100\%$$

$$\frac{(267.14)}{100} x\ 100\% = 267.14\%$$

Namun, penilaian yang digunakan dalam menghitung capaian sasaran mauritas SPIP adalah hasil evaluasi atas penilaian mandiri Maturitas SPIP dari BPKP RI, sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh BPKP RI tanggal 30 Desember 2022, Nomor : SP-1557/D3/04/2022, Maturitas SPIP Inspektorat Daerah Provinsi Banten berada pada **level 3 (Terdefinisi).**

Dalam Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Banten tahun 2017-2022, target sasaran Maturitas SPIP Inspektorat Daerah Provinsi Banten pada tahun 2022 berada pada level 4, sehingga :

**Capaian Maturitas SPIP**

Target Renstra tahun 2022 : Level 4

Realisasi Maturitas SPIP tahun 2022 : Level 3

Capaian Maturitas SPIP : 75%

Berdasarkan hal diatas, dapat diketahui bahwa capaian indikator kinerja program yang tinggi tidak berpengaruh secara langsung terhadap hasil capaian indikator kinerja sasaran. Kondisi tersebut disebabkan dari perbedaan dalam persepsi penilaian yang digunakan dalam menghitung capaian indikator kinerja program dengan capaian indikator kinerja sasaran.

Capaian maturitas SPIP dapat dipengaruhi dari faktor internal maupun faktor eksternal, berikut merupakan penjelasannya :

**A. Faktor Internal**

1. Belum menerapkan implementasi manajemen risiko secara konsisten melalui penyediaan sumber daya untuk pelaksanaan manajemen risiko;
2. Belum menggunakan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan dan belum menjadikan manajemen risiko sebagai tolok ukur penilaian kinerja;

3. Fasilitas bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko belum memadai;
4. Belum sepenuhnya risiko kemitraan yang ada pada seluruh OPD telah diidentifikasi dan dikelola;
5. Belum terdapat bukti yang memadai yang menunjukan pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) telah efektif menurunkan tingkat risiko;
6. Pengkomunikasian risk register dan rencana tindak pengendalian kepada pihak terkait belum sepenuhnya dilakukan;

**B. Faktor Eksternal**

Maturitas SPIP merupakan sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Banten, namun dalam penilaiannya terdapat beberapa indikator sistem pengendalian intern seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, sehingga maturitas SPIP tidak bisa hanya diintervensi oleh kegiatan pengawasan yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Banten semata, perlu adanya keterlibatan dari seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, khususnya beberapa OPD kunci, yakni Bappeda, BPKAD, dan Bappeda.

Hal ini dapat dilihat dari laporan hasil evaluasi BPKP terhadap maturitas SPIP Provinsi Banten, hal-hal yang perlu ditingkatkan untuk mewujudkan pengendalian intern yang optimal, antara lain:

1. Penetapan Tujuan
   a. Kualitas Sasaran Strategis
      1) Masih terdapat sasaran strategis OPD belum sepenuhnya berorientasi hasil;
      2) Masih terdapat sasaran strategis OPD yang belum sepenuhnya menggambarkan isu strategis;
      3) Masih terdapat Indikator kinerja sasaran strategis OPD belum berorientasi pada hasil;
      4) Masih terdapat Target kinerja yang belum SMART.
   b. Kualitas Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan

1) Masih terdapat sasaran program yang belum berorientasi *outcome;*
2) Masih terdapat sasaran kegiatan yang belum berorientasi hasil;
3) Masih terdapat Indikator kinerja program dan kegiatan yang belum cukup untuk menggambarkan sasaran;
4) Masih adanya Kualitas Indikator Kinerja Program/Kegiatan yang belum SMART.

2. Pencapaian Tujuan

a. Efektivitas dan Efisiensi

Kualitas sasaran strategis dan kualitas strategi pencapaian sasaran strategis belum sepenuhnya baik, karena masih terdapat sasaran program belum menggambarkan secara keseluruhan dari sasaran strategis OPD yang akan dicapai.

b. Keandalan Laporan Keuangan

Masih terdapat temuan berulang meskipun opini LKPD telah WTP berturut-turut selama kurun waktu 5 tahun.

c. Ketaatan pada Peraturan

Masih terdapat temuan ketidakpatuhan terhadap Perundang-undangan namun tidak mempengaruhi Opini LKPD.

Dapat dilihat pada komponen penetapan tujuan dan pencapaian tujuan, Perangkat Daerah yang memiliki andil besar adalah Bappeda dan BPKAD. Hal ini menunjukan bahwa dalam meningkatkan level maturitas SPIP memerlukan keterlibatan dan Kerjasama berbagai pihak.

**B.2 Capaian Kapabilitas APIP**

Realisasi indikator kinerja sasaran kapabilitas APIP adalah hasil dari realisasi kinerja atas Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan indikator kinerjanya yaitu Persentase

Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan sebesar 241.2%.

Berdasarkan realisasi atas 1 (satu) capaian indikator program, dapat dihitung besaran capaian program sebesar 241.2% yang merupakan hasil perhitungan dari rata-rata capaian indikator program.

Dari hasil capaian program tersebut, dapat dihitung realisasi pada indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

**Realisasi Indikator Kinerja Sasaran**

$$\frac{(\text{target indikator kinerja sasaran } x \text{ capaian program})}{100}$$

$$\frac{(100\ x\ 241.2)}{100} = 241.2$$

Sehingga menghasilkan capaian indikator sasaran sebagai berikut :

**capaian indikator sasaran**

$$\frac{\text{Realisasi Indikator Kinerja Sasaran}}{\text{target}}\ x\ 100\%$$

$$\frac{(241.2)}{100}\ x\ 100\% = 241.2\%$$

Namun, penilaian yang digunakan dalam menghitung capaian sasaran Kapabilitas APIP adalah hasil evaluasi atas penilaian mandiri Kapabilitas APIP dari BPKP RI, sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh BPKP RI tanggal 31 Oktober 2022, Nomor : PE.09.03/LHP-618/PW30/6/2022, Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Banten berada pada **level 3 (*Delivered*).**

Dalam Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Banten tahun 2017-2022, target sasaran Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Banten pada tahun 2022 berada pada level 4, sehingga :

**Capaian Kapabilitas APIP**

Target Renstra tahun 2022 : Level 4

Realisasi Kapabilitas APIP tahun 2022 : Level 3

Capaian Kapabilitas APIP : 75%

Berdasarkan hal diatas, dapat diketahui bahwa capaian indikator kinerja program yang tinggi tidak berpengaruh secara langsung terhadap hasil capaian indikator kinerja sasaran. Kondisi tersebut lebih disebabkan pada permasalahan dan hambatan seperti penjelasan dibawah ini:

Kegiatan pengawasan yang ada dalam program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi tidak mendukung terhadap Capaian Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Provinsi Banten, sehingga aktivitas yang dilaksanakan tidak berpengaruh terhadap penilaian Kapabilitas APIP.

Elemen dalam penilaian Kapabilitas APIP, yaitu :

I. Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler)*;
    1. Pengelolaan SDM;
    2. Praktik Profesional;
    3. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja;
    4. Budaya dan Hubungan Organisasi;
    5. Struktur Tata Kelola.

II. Komponen Aktivitas Pengawasan (*Delivery)* dan Kualitas Pengawasan (*Result)*;
    1. Peran dan Layanan.

       Sedangkan output dari program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi antara lain:

        1. Kebijakan teknis bidang pengawasan;

           Merupakan kegiatan yang memfasilitasi pembuatan program kerja pengawasan tahunan, peraturan dibidang pengawasan atau kerjasama pengawasan antara Inspektorat dengan pihak eksternal.

2. Pendampingan dan asistensi kegiatan pengawasan;

   Merupakan kegiatan pendampingan kepada OPD dalam pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan penegakan integritas.

3. Koordinasi dan evaluasi kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi;

   Merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan *Monitoring Center of Prefention* (MCP) KPK.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa tidak adanya keterkaitan antara elemen dalam penilaian Kapabilitas APIP dengan output dari program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi. Hal ini mengakibatkan tidak adanya dukungan sumberdaya yang memadai dari program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi terhadap capaian kapabilitas APIP.

## 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaran Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Provinsi Banten sebagai *Quality Assurance* mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk mengawal kinerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten untuk menjalankan aktivitas pemerintahan dengan transparan dan akuntabel sehingga dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang baik serta bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat daerah Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

a. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga masih perlu dukungan sepenuhnya dengan kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur serta ketersedian sarana prasaran kerja yang memadai. Sehingga akan cukup menghambat terhadap kelancaran dan

ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian kinerja kelembagaan;

b. Tingkat koordinasi teknis pengawasan secara internal dan eksternal masih perlu terus ditingkatkan sebagaimana yang diharapkan, sehingga cukup informatif secara tepat dan terarah dalam menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi pengawasan;
c. Masih tingginya pelanggaran penyalahgunaan anggaran yang berakibat masih adanya pengembalian untuk pajak maupun keuangan daerah, hal ini masih lemahnya sistem pengawasan baik eksternal maupun internal termasuk pengawasan masyarakat.
d. Rendahnya kinerja sumber daya manusia aparatur, belum memadainya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang berakibat pada rendahnya mutu pelayanan publik yang harus ditangani;
e. Reformasi birokrasi perlu membangun komitmen moral bersama secara utuh dari segenap unsur baik aparatur negara maupun masyarakat dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik.
f. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga masih perlu dukungan sepenuhnya dengan kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur serta ketersedian sarana prasaran kerja yang memadai. Sehingga akan cukup menghambat terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian kinerja kelembagaan;
g. Tingkat koordinasi teknis pengawasan secara internal dan eksternal masih perlu terus ditingkatkan sebagaimana yang diharapkan, sehingga cukup informatif secara tepat dan terarah dalam menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi pengawasan;
h. Masih tingginya pelanggaran penyalahgunaan anggaran yang berakibat masih adanya pengembalian untuk pajak maupun keuangan daerah, hal ini masih lemahnya sistem

pengawasan baik eksternal maupun internal termasuk pengawasan masyarakat.

i. Rendahnya kinerja sumber daya manusia aparatur, belum memadainya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang berakibat pada rendahnya mutu pelayanan publik yang harus ditangani;

j. Reformasi birokrasi perlu membangun komitmen moral bersama secara utuh dari segenap unsur baik aparatur negara maupun masyarakat dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik.

Tabel 2.7
Permasalahan, faktor pendorong dan penghambat Inspektorat

| Permasalahan | Faktor Pendorong | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| Belum optimalnya pelaksanaan audit, reviu, pendampingan monitoring dan tindak lanjut | 1 *Internal Audit Charter* (IAC) | 1 Kompetensi serta jumlah SDM APIP dan sarana prasarana yang menunjang pemeriksaan belum memadai |
| Masih rendahnya tingkat penyelesaian kerugian negara | 2 *Political Will* pemerintah yang menempatkan peran pengawasan dalam posisi strategis dalam sistem manajemen pembangunan baik di nasional maupuan daerah | 2 Komitmen OPD dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, penyusunan manajemen risiko masih rendah |
| Belum Optimalnya Implementasi SAKIP pada OPD | 3 Inspektorat selaku APIP sebagai pengawal pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang strategis | 3 Komitmen OPD tentang pemenuhan PMPRB dalam organisasinya masih rendah |
| Keseriusan OPD masih kurang dalam meningkatkan nilai SAKIP | | 4 Komitmen APIP dalam peningkatan kapabilitas APIP belum optimal |
| Belum terimplementasikanny a Zona Integritas (ZI) dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Unit Kerja yang bersentuhan dengan pelayanan publik | 4 Adanya Komitmen pimpinan yang tinggi dan peraturan tentang pembentukan organisasi dan tupoksi pembinaan dan pengawasan sebagai produk hukum daerah | 5 Komitmen unit kerja dalam mewujudkan Zona Integritas masih sangat rendah |
| | | 6 Kurangnya metode pembinaan pengawasan |

## 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif perangkat daerah, maka analisis kebutuhan serta rancangan awal RKPD Inspektorat sebagai berikut :

Tabel 2.8
Review Terhadap Rancangan RKPD 2024

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROGRAM/KEGIATAN** | **INDIKATOR KINERJA** | **LOKASI** | **TARGET CAPAIAN** | **PAGU INDIKATIF (Rp.)** | **PROGRAM/KEGIATAN** | **INDIKATOR KINERJA** | **LOKASI** | **TARGET CAPAIAN** | **KEBUTUHAN DANA (Rp.)** | |
| **Inspektorat Daerah** | | | | **59,927,967,000** | **Inspektorat Daerah** | | | | **59,927,967,000** | |
| **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** | **Persentase Ketercapaian dari seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Provinsi** | Provinsi Banten | **100** | **51,052,090,000** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** | **Persentase Ketercapaian dari seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Provinsi** | Provinsi Banten | **100** | **51,052,090,000** | |
| Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Provinsi Banten | 100 | 259,627,000 | Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Provinsi Banten | 100 | 259,627,000 | |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | LOKASI | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (Rp.) | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | LOKASI | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA (Rp.) | |
| Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Provinsi Banten | 6 Dokumen | 180,845,000 | Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Provinsi Banten | 6 Dokumen | 180,845,000 | |
| Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Provinsi Banten | 4 Dokumen | 27,600,000 | Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Provinsi Banten | 4 Dokumen | 27,600,000 | |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Provinsi Banten | 4 Dokumen | 51,182,000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Provinsi Banten | 4 Dokumen | 51,182,000 | |
| Administrasi Keuangan Perangkat daerah | Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah | Provinsi Banten | 100 | 43,685,820,000 | Administrasi Keuangan Perangkat daerah | Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah | Provinsi Banten | 100 | 43,685,820,000 | |
| Penyediaan Gaji dan Tujangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Provinsi Banten | 14 Bulan | 43,297,800,000 | Penyediaan Gaji dan Tujangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Provinsi Banten | 14 Bulan | 43,297,800,000 | |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Provinsi Banten | 12 Dokumen | 338,550,000 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Provinsi Banten | 12 Dokumen | 338,550,000 | |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | LOKASI | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (Rp.) | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | LOKASI | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA (Rp.) | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Provinsi Banten | 12 Dokumen | 49,470,000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Provinsi Banten | 12 Dokumen | 49,470,000 | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase ketercapaian Administrasi Kepegawaian perangkat daerah | Provinsi Banten | 100 | 450,000,000 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase ketercapaian Administrasi Kepegawaian perangkat daerah | Provinsi Banten | 100 | 450,000,000 | |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Provinsi Banten | 60 Orang | 450,000,000 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Provinsi Banten | 60 Orang | 450,000,000 | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah | Provinsi Banten | 100 | 1,307,195,600 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah | Provinsi Banten | 100 | 1,307,195,600 | |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Provinsi Banten | 1 Dokumen | 107,800,000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Provinsi Banten | 1 Dokumen | 107,800,000 | |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROGRAM/KEGIATAN** | **INDIKATOR KINERJA** | **LOKASI** | **TARGET CAPAIAN** | **PAGU INDIKATIF (Rp.)** | **PROGRAM/KEGIATAN** | **INDIKATOR KINERJA** | **LOKASI** | **TARGET CAPAIAN** | **KEBUTUHAN DANA (Rp.)** | |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Provinsi Banten | 2 Dokumen | 348,781,600 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Provinsi Banten | 2 Dokumen | 348,781,600 | |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Provinsi Banten | 2 Dokumen | 313,714,000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Provinsi Banten | 2 Dokumen | 313,714,000 | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Provinsi Banten | 12 Dokumen | 350,000,000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Provinsi Banten | 12 Dokumen | 350,000,000 | |
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Provinsi Banten | 2 Dokumen | 186,900,000 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Provinsi Banten | 2 Dokumen | 186,900,000 | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Provinsi Banten | 100 | 166,516,000 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Provinsi Banten | 100 | 166,516,000 | |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Provinsi Banten | 1 Dokumen | 166,516,000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Provinsi Banten | 1 Dokumen | 166,516,000 | |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | LOKASI | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (Rp.) | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | LOKASI | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA (Rp.) | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase tersusunnya laporan jasa penunjang urusan pemerinthan daerah | Provinsi Banten | 100 | 2,648,216,400 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase tersusunnya laporan jasa penunjang urusan pemerinthan daerah | Provinsi Banten | 100 | 2,648,216,400 | |
| Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Provinsi Banten | 12 Bulan | 641,462,400 | Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Provinsi Banten | 12 Bulan | 641,462,400 | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Provinsi Banten | 12 Bulan | 2,006,754,000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Provinsi Banten | 12 Bulan | 2,006,754,000 | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah | Provinsi Banten | 100 | 2,534,715,000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah | Provinsi Banten | 100 | 2,534,715,000 | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | Provinsi Banten | 1 Unit | 75,910,000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | Provinsi Banten | 1 Unit | 75,910,000 | |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROGRAM/KEGIATAN** | **INDIKATOR KINERJA** | **LOKASI** | **TARGET CAPAIAN** | **PAGU INDIKATIF (Rp.)** | **PROGRAM/KEGIATAN** | **INDIKATOR KINERJA** | **LOKASI** | **TARGET CAPAIAN** | **KEBUTUHAN DANA (Rp.)** | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Provinsi Banten | 28 Unit | 555,020,000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Provinsi Banten | 28 Unit | 555,020,000 | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Provinsi Banten | 181 Unit | 131,770,000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Provinsi Banten | 181 Unit | 131,770,000 | |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Provinsi Banten | 1 Gedung | 1,772,015,000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Provinsi Banten | 1 Gedung | 1,772,015,000 | |
| | | | | **7,381,913,000** | | | | | **7,381,913,000** | |
| **Program Penyelenggaraan Pengawasan** | **Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Pengawasan** | **Provinsi Banten** | **100** | **6,518,218,000** | **Program Penyelenggaraan Pengawasan** | **Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Pengawasan** | **Provinsi Banten** | **100** | **6,518,218,000** | |
| | **Persentase Jumlah Temuan yang telah ditindaklanjuti** | **Provinsi Banten** | **100** | **863,695,000** | | **Persentase Jumlah Temuan yang telah ditindaklanjuti** | **Provinsi Banten** | **100** | **863,695,000** | |
| Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Terlaksananya penyelenggaraan Pengawasan Internal | Provinsi Banten | 100 | 6,518,218,000 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Terlaksananya penyelenggaraan Pengawasan Internal | Provinsi Banten | 100 | 6,518,218,000 | |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | LOKASI | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (Rp.) | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | LOKASI | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA (Rp.) | |
| Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Provinsi Banten | 15 Dokumen | 638,846,000 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Provinsi Banten | 15 Dokumen | 638,846,000 | |
| Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Provinsi Banten | 192 Dokumen | 4,995,952,000 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Provinsi Banten | 192 Dokumen | 4,995,952,000 | |
| Reviu Laporan Kinerja | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | Provinsi Banten | 46 Dokumen | 182,350,000 | Reviu Laporan Kinerja | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | Provinsi Banten | 46 Dokumen | 182,350,000 | |
| Reviu Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | Provinsi Banten | 85 Dokumen | 217,340,000 | Reviu Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | Provinsi Banten | 85 Dokumen | 217,340,000 | |
| Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Provinsi Banten | 8 Dokumen | 483,730,000 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Provinsi Banten | 8 Dokumen | 483,730,000 | |
| Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Terlaksananya penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Provinsi Banten | 100 | 863,695,000 | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Terlaksananya penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Provinsi Banten | 100 | 863,695,000 | |
| Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | Provinsi Banten | 4 Dokumen | 144,420,000 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | Provinsi Banten | 4 Dokumen | 144,420,000 | |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROGRAM/KEGIATAN** | **INDIKATOR KINERJA** | **LOKASI** | **TARGET CAPAIAN** | **PAGU INDIKATIF (Rp.)** | **PROGRAM/KEGIATAN** | **INDIKATOR KINERJA** | **LOKASI** | **TARGET CAPAIAN** | **KEBUTUHAN DANA (Rp.)** | |
| Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Provinsi Banten | 10 Dokumen | 719,275,000 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Provinsi Banten | 10 Dokumen | 719,275,000 | |
| Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Persentase Ketercapaian Pendampingan dan Asistensi | Provinsi Banten | 100 | 1,493,964,000 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Persentase Ketercapaian Pendampingan dan Asistensi | Provinsi Banten | 100 | 1,493,964,000 | |
| Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Terciptanya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Provinsi Banten | 100 | 161,177,250 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Terciptanya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Provinsi Banten | 100 | 161,177,250 | |
| Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | Provinsi Banten | 8 Dokumen | 161,177,250 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | Provinsi Banten | 8 Dokumen | 161,177,250 | |
| Pendampingan dan Asistensi | Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi | Provinsi Banten | 100 | 1,332,786,750 | Pendampingan dan Asistensi | Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi | Provinsi Banten | 100 | 1,332,786,750 | |
| Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Provinsi Banten | 29 Dokumen | 595,275,000 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Provinsi Banten | 29 Dokumen | 595,275,000 | |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROGRAM/KEGIATAN** | **INDIKATOR KINERJA** | **LOKASI** | **TARGET CAPAIAN** | **PAGU INDIKATIF (Rp.)** | **PROGRAM/KEGIATAN** | **INDIKATOR KINERJA** | **LOKASI** | **TARGET CAPAIAN** | **KEBUTUHAN DANA (Rp.)** | |
| Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Provinsi Banten | 1 Dokumen | 138,240,000 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Provinsi Banten | 1 Dokumen | 138,240,000 | |
| Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Provinsi Banten | 6 Dokumen | 480,731,750 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Provinsi Banten | 6 Dokumen | 480,731,750 | |
| Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Provinsi Banten | 1 Dokumen | 118,540,000 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Provinsi Banten | 1 Dokumen | 118,540,000 | |

## 2.5. Penelaahan Usalan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang diselenggaranakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Banten bersama dengan para pemangku kepentingan, tidak terdapat usulan program/kegiatan dari para pemangku kepentingan yang hadir dalam forum musrenbang tersebut untuk Inspektorat Daerah Provinsi Banten.

Tabel 2.9
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan
Tahun 2024

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | BESARAN/VOLUME | CATATAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# BAB III
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pelaksanaan program kegiatan yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Banten memperhatikan dan mempertimbangkan kebijakan nasional dari KPK dan juga peraturan dari pusat, antara lain :

a. Pelaksanaan Monev terhadap Aksi Pencegahan Korupsi sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
b. Sapu Bersih Pungutan Liar mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
c. Pelaksanaan Maturitas SPIP mengacu pada Paraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, haruslah didukung dengan tujuan dan sasaran yang mengacu pada pernyataan Visi dan Misi. Adapun Tujuan RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026 yang mendukung misi ke-4 (empat) adalah :

"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih"

Sesuai tugas dan fungsinya untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan, maka Tujuan Inspektorat sebagai Perangkat Daerah untuk mendukung tujuan Pemerintah Provinsi Banten adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah.

Adapun Sasaran RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026 yang mendukung misi ke-4 (empat) adalah :

"Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi"

Maka Sasaran Inspektorat sebagai Perangkat Daerah untuk mendukung sasaran Pemerintah Provinsi Banten adalah:

1. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja Pelayanan Publik Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Untuk mengetahui atau mengukur apakah tujuan dan sasaran Inspektorat telah tercapai atau belum tercapai maka digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Tujuan penetapan IKU adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis OPD yang dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja dalam rangka memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan stakeholder.

Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Banten pada tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Sasaran dan target Inspektorat Daerah Provinsi Banten
tahun 2023

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 2023 |
| 1. | Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan | Capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD | Nilai | 70-80 |
| 2. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Nilai SAKIP pada komponen Evaluasi Internal | Nilai | 14.99 |
| | | Nilai Maturitas SPIP | Level | 3.2375 |
| 3. | Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja Pelayanan Publik Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) | Jumlah Unit Kerja yang berpredikat ZI | Unit Kerja | 1 |

## 3.3. Program dan Kegiatan

Kebijakan yang ditetapkan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja perubahan Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2024, selanjutnya dijabarkan dalam 3 (tiga) program antara lain:

a. Program Tata Kelola Pemerintahan;
b. Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah;
c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Program yang telah ditetapkan, selanjutnya diimplementasikan kedalam bentuk Kegiatan yang disusun dengan prinsip anggaran berbasis kinerja dimana kegiatan disusun berdasarkan tolok ukur dan target kinerja serta menjelaskan lokasi dan indikasi anggaran.

Secara keseluruhan terdapat 11 (sepuluh) rencana kegiatan untuk anggaran tahun 2024 pada Inspektorat Provinsi Banten antara lain:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
f. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
g. Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah;
h. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
i. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;
j. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
k. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi.

Program dan kegiatan pada tahun 2024 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2. Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2024

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | DPA Tahun 2023 | Pagu Renja 2024 | | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Renja Awal | Renja Akhir | |
| | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | |
| | **INSPEKTORAT DAERAH** | **71,643,000,000.00** | **72,100,869,680.00** | **71,800,870,000.00** | **299,999,680.00** |
| **I** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **62,868,778,000.00** | **69,264,144,260.00** | **69,264,924,580.00** | **(780,320.00)** |
| **A** | **Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **307,170,000.00** | **88,246,400.00** | **88,246,400.00** | - |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Inspektorat) | 246,200,000.00 | 54,298,000.00 | 54,298,000.00 | - |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Inspektorat) | 12,200,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | - |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Inspektorat) | 12,200,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | - |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Inspektorat) | 12,900,000.00 | 7,061,000.00 | 7,061,000.00 | - |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD (Inspektorat) | 12,900,000.00 | 7,061,000.00 | 7,061,000.00 | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Inspektorat) | 4,800,000.00 | 4,208,800.00 | 4,208,800.00 | - |
| 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Inspektorat) | 5,970,000.00 | 3,617,600.00 | 3,617,600.00 | - |
| **B** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **55,424,855,600.00** | **64,892,261,360.00** | **64,892,261,360.00** | - |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Inspektorat) | 55,057,985,600.00 | 64,525,391,360.00 | 64,525,391,360.00 | - |
| 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Inspektorat) | 334,470,000.00 | 334,470,000.00 | 334,470,000.00 | - |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Inspektorat) | 32,400,000.00 | 32,400,000.00 | 32,400,000.00 | - |
| **C** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **1,400,000,000.00** | **270,000,000.00** | **270,000,000.00** | - |
| 1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Inspektorat) | 200,000,000.00 | | | - |
| 2 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Belanja Jasa Tenaga Kesehatan) | 200,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | - |
| 3 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Inspektorat) | 1,000,000,000.00 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | - |
| **D** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **1,607,158,600.00** | **650,000,000.00** | **650,000,000.00** | - |
| 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Inspektorat) | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | | 99,601,300.00 | 99,601,300.00 | - |
| | Cetak Pengandaaan | | 398,700.00 | 398,700.00 | - |
| 2 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Inspektorat) | 513,774,700.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | - |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | 12,034,300.00 | 12,034,300.00 | - |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Kertas HVS) | | 75,752,000.00 | 75,752,000.00 | - |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Tinta) | | 75,168,000.00 | 75,168,000.00 | - |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | | 25,933,600.00 | 25,933,600.00 | - |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | 11,112,100.00 | 11,112,100.00 | - |
| | Belanja Bahan-Bahan Kimia | | | | - |
| 3 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Inspektorat) | 181,040,000.00 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | - |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | 146,260,000.00 | 146,260,000.00 | - |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | 3,574,700.00 | 3,574,700.00 | - |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | 165,300.00 | 165,300.00 | - |
| 4 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Inspektorat) | 712,343,900.00 | 175,000,000.00 | 175,000,000.00 | - |
| | Belanja Sewa Hotel | | | | - |
| | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | 62,296,000.00 | 62,296,000.00 | - |
| | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | | 111,678,000.00 | 111,678,000.00 | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Cetak Pengandaaan | | 1,026,000.00 | 1,026,000.00 | - |
| 5 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Inspektorat) | 100,000,000.00 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | - |
| **E** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **200,000,000.00** | **97,659,200.00** | **98,439,520.00** | (780,320.00) |
| 1 | Pengadaan Mebel (Inspektorat) | 100,000,000.00 | | | - |
| 2 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Inspektorat) | 100,000,000.00 | 97,659,200.00 | 98,439,520.00 | (780,320.00) |
| **F** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **2,876,019,000.00** | **2,785,977,300.00** | **2,785,977,300.00** | - |
| 1 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (Inspektorat) | 641,462,400.00 | 641,462,400.00 | 641,462,400.00 | - |
| | Belanja Jasa Telepon / Faksimili | | 39,600,000.00 | 39,600,000.00 | - |
| | Belanja Tagihan Listrik | | 601,862,400.00 | 601,862,400.00 | - |
| 2 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Inspektorat) | 2,234,556,600.00 | 2,144,514,900.00 | 2,144,514,900.00 | - |
| | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Benda pos | | 3,450,000.00 | 3,450,000.00 | - |
| | Belanja Natura dan Pakan-Natura | | 54,563,300.00 | 54,563,300.00 | - |
| | Belanja Makan dan Minum Rapat | | 432,000,000.00 | 432,000,000.00 | - |
| | Belanja Makan dan Minum Jamuan Tamu | | 141,120,000.00 | 141,120,000.00 | - |
| | Belanja Jasa tenaga Administrasi | | 579,000,000.00 | 579,000,000.00 | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | | 401,594,000.00 | 401,594,000.00 | - |
| | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | | 359,100,000.00 | 359,100,000.00 | - |
| | Belanja Jasa Tenaga Supir | | 87,750,000.00 | 87,750,000.00 | - |
| | Belanja Jasa Iklan/Reklame,Film, dan Pemotretan | | 1,386,500.00 | 1,386,500.00 | - |
| | Belanja langganan Jurnal/Surat Kabar/ Majalah | | 2,566,500.00 | 2,566,500.00 | - |
| | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan / Asuransi | | 76,752,000.00 | 76,752,000.00 | - |
| | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non Asn | | 2,325,600.00 | 2,325,600.00 | - |
| | Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN | | 2,907,000.00 | 2,907,000.00 | - |
| | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | | | | - |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | - |
| **G** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1,053,574,800.00** | **480,000,000.00** | **480,000,000.00** | - |
| 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Inspektorat) | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | - |
| 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Inspektorat) | 641,804,800.00 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | - |
| 3 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Inspektorat) | 131,770,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Inspektorat) | 200,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | - |
| **II** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | **7,789,982,000.00** | **2,448,295,320.00** | **2,195,515,320.00** | **252,780,000.00** |
| **A** | **Penyelenggaraan Pengawasan Internal** | **6,102,504,000.00** | **1,830,142,820.00** | **1,604,362,820.00** | **225,780,000.00** |
| 1 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Inspektorat) | 556,600,000.00 | 347,220,000.00 | 279,930,000.00 | 67,290,000.00 |
| | **Irban I** | 119,700,000.00 | 50,100,000.00 | 50,100,000.00 | - |
| | Audit kinerja program dan kegiatan dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten | | 50,100,000.00 | 50,100,000.00 | - |
| | **Irban II** | | 39,900,000.00 | 30,300,000.00 | 9,600,000.00 |
| | Audit Kinerja Program Prioritas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten | | 39,900,000.00 | 30,300,000.00 | 9,600,000.00 |
| | **Irban III** | 366,340,000.00 | 257,220,000.00 | 199,530,000.00 | 57,690,000.00 |
| | Pemeriksaan Urusan Konkuren Pemda Provinsi Banten | | 44,100,000.00 | 28,050,000.00 | 16,050,000.00 |
| | Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik | | 32,490,000.00 | 24,240,000.00 | 8,250,000.00 |
| | Monitoring Terhadap Evaluasi LPPD Kab./ Kota se-Provinsi Banten | | 37,770,000.00 | 25,260,000.00 | 12,510,000.00 |
| | Pengawasan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Banten | | 33,810,000.00 | 25,260,000.00 | 8,550,000.00 |
| | Monitoring Tindak Lanjut hasil Pengawasan pada OPD Provinsi Banten | | | 25,260,000.00 | (25,260,000.00) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Monitoring PPDB SMAN / SMKN Provinsi Banten | | 68,640,000.00 | 46,200,000.00 | 22,440,000.00 |
| | Pengawasan Umum GWPP pada Kab/Kota Provinsi Banten | | 40,410,000.00 | 25,260,000.00 | 15,150,000.00 |
| | Sosialisasi/pendampingan pengawasan internal | | | | - |
| | **Irban IV** | 70,560,000.00 | | | - |
| | Evaluasi Manajemen ASN (Pengawasan Pengendalian Kepegawaian Daerah) - MONEV SPT TAHUNAN Tahun 2023 | | | | - |
| | Evaluasi Manajemen ASN (Pengawasan Pengendalian Kepegawaian Daerah) - MONEV LHKPN Tahun 2023 | | | | - |
| 2 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Inspektorat) | 4,451,184,000.00 | 594,450,000.00 | 559,050,000.00 | 35,400,000.00 |
| | **Irban I** | 1,111,240,000.00 | 288,750,000.00 | 288,750,000.00 | - |
| | Audit Ketaatan Tahap 1 & 2 di Lingkungan SKPD Pemerintah Provinsi Banten | | 100,200,000.00 | 100,200,000.00 | - |
| | Audit Ketaatan Bantuan Keuangan Pemprov Banten kepada Pemerintah Kab./Kota (TA 2022/TA 2023) | | 45,600,000.00 | 45,600,000.00 | - |
| | Probity Audit | | 50,700,000.00 | 50,700,000.00 | - |
| | Monitoring dan Evaluasi LK-OPD TA. 2022 | | 30,450,000.00 | 30,450,000.00 | - |
| | Monitoring Kas dan Stok Opname OPD/UPT/Sekolah Tahap 1 dan 2 | | 50,700,000.00 | 50,700,000.00 | - |
| | Monitoring / Evaluasi BMD | | 11,100,000.00 | 11,100,000.00 | - |
| | **Irban II** | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 973,534,000.00 | 305,700,000.00 | 270,300,000.00 | 35,400,000.00 |
| | Probity Audit atas Pengadaan Barang dan Jasa TA. 2024 | | 35,700,000.00 | 35,700,000.00 | - |
| | Audit Ketaatan Bantuan Keuangan pada Pemerintah Kab/Kota | | 53,700,000.00 | 53,700,000.00 | - |
| | Audit Ketaatan Program dan Kegiatan Prioritas pada OPD di Lingkungan | | 53,700,000.00 | 53,400,000.00 | 300,000.00 |
| | Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah TA. 2024 | | 11,400,000.00 | | 11,400,000.00 |
| | Monev Dana Desa dan Kelurahan (APBN) TA. 2024 | | 35,700,000.00 | 35,700,000.00 | - |
| | Lanjutan Monitoring dan Evaluasi Kas Opname, Stock Opname dan Rekon | | 36,000,000.00 | 35,700,000.00 | 300,000.00 |
| | Monitoring dan Evaluasi LK-OPD TA. 2023 | | 45,000,000.00 | 44,700,000.00 | 300,000.00 |
| | Monitoring dan Evaluasi Kas Opname, Stock Opname dan Rekon Aset TA. 2024 pada OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten | | 10,500,000.00 | | 10,500,000.00 |
| | Monitoring dan Reviu Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Banten TA. 2024 | | | | - |
| | Monitoring P3DN (E-Katalog dan Bela Pengadaan) | | 24,000,000.00 | 11,400,000.00 | 12,600,000.00 |
| | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | | - |
| | **Irban** | 2,366,410,000.00 | | | - |
| 3 | Reviu Laporan Kinerja (Inspektorat) | 361,820,000.00 | 292,590,000.00 | 253,500,000.00 | 39,090,000.00 |
| | **Irban I** | 64,200,000.00 | 50,700,000.00 | 50,700,000.00 | - |
| | Evaluasi SPIP (Struktur ,Proses dan MRI) Tahun 2024 | | 25,350,000.00 | 25,350,000.00 | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Reviu Dokumen Perencanaan Hibah/Bansos TA 2023 | | 25,350,000.00 | 25,350,000.00 | - |
| | **Irban II** | 72,600,000.00 | 56,700,000.00 | 35,700,000.00 | 21,000,000.00 |
| | Evaluasi Pengelolaan Resiko dan SPIP di Lingkungan Pemerintah | | 45,000,000.00 | 35,700,000.00 | 9,300,000.00 |
| | Monitoring dan Reviu Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Banten TA. 2024 | | 11,700,000.00 | | 11,700,000.00 |
| | **Irban III** | 225,020,000.00 | 185,190,000.00 | 167,100,000.00 | 18,090,000.00 |
| | Verifikasi dan Validasi IKK Penyelenggaraan Urusan pada OPD Provinsi Banten | | | | - |
| | Reviu Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan | | 32,490,000.00 | 24,300,000.00 | 8,190,000.00 |
| | Reviu RKPD Murni Provinsi Banten Tahun 2025 | | 18,150,000.00 | 18,150,000.00 | - |
| | Reviu RKPD Perubahan Provinsi Banten Tahun 2024 | | 18,150,000.00 | 18,150,000.00 | - |
| | Reviu Renja Murni OPD Provinsi Banten Tahun 2025 | | 18,150,000.00 | 21,300,000.00 | (3,150,000.00) |
| | Reviu Renja Perubahan OPD Provinsi Banten Tahun 2024 | | 18,150,000.00 | 21,300,000.00 | (3,150,000.00) |
| | Reviu LPPD Provinsi Banten | | 29,850,000.00 | 21,300,000.00 | 8,550,000.00 |
| | Reviu LKjIP Provinsi Banten | | | | - |
| | Reviu LKjIP OPD Provinsi Banten | | | | - |
| | Monitoring AKIP OPD Provinsi Banten | | | 21,300,000.00 | (21,300,000.00) |
| | Evaluasi Laporan AKIP OPD Provinsi Banten | | 50,250,000.00 | 21,300,000.00 | 28,950,000.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Reviu Laporan Keuangan (Inspektorat) | 632,770,000.00 | 474,162,820.00 | 390,162,820.00 | 84,000,000.00 |
| | **Irban I** | 376,900,000.00 | 419,562,820.00 | 344,562,820.00 | 75,000,000.00 |
| | Reviu RKA Perubahan TA. 2023 | | 121,882,820.00 | 100,182,820.00 | 21,700,000.00 |
| | Reviu RKA Murni TA. 2024 | | 121,580,000.00 | 98,280,000.00 | 23,300,000.00 |
| | Reviu LKPD TA. 2022 | | 102,300,000.00 | 72,300,000.00 | 30,000,000.00 |
| | Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2023 Tahap 1,2, 3 dan 4 | | 73,800,000.00 | 73,800,000.00 | - |
| | **Irban II** | | 18,300,000.00 | 9,300,000.00 | 9,000,000.00 |
| | Reviu DAK Fisik TA. 2024 | | 18,300,000.00 | 9,300,000.00 | 9,000,000.00 |
| | **Irban III** | 255,870,000.00 | 36,300,000.00 | 36,300,000.00 | - |
| | Reviu KUA-PPAS Murni Tahun 2025 | | 18,150,000.00 | 18,150,000.00 | - |
| | Reviu KUA PPAS Perubahan Provinsi Banten Tahun 2024 | | 18,150,000.00 | 18,150,000.00 | - |
| 5 | Kerjasama Pengawasan Internal (Inspektorat) | 27,680,000.00 | 86,720,000.00 | 86,720,000.00 | - |
| 6 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Inspektorat) | 72,450,000.00 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | - |
| | Operator Aplikasi SIMHP | | 23,400,000.00 | 23,400,000.00 | - |
| | Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | | 11,600,000.00 | 11,600,000.00 | - |
| | Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | | | | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **B** | **Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu** | **1,687,478,000.00** | **618,152,500.00** | **591,152,500.00** | **27,000,000.00** |
| 1 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (Inspektorat) | **733,422,000.00** | **215,552,500.00** | **215,552,500.00** | - |
| | Penggandaan dan Penjilidan Laporan Hasil Pengawasan | | 132,600,000.00 | 132,600,000.00 | - |
| | Penyusunan Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan | | 1,160,500.00 | 1,160,500.00 | - |
| | Rapat Fasilitasi Kapabilitas APIP | | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | - |
| | Tim Penyelesaian Kerugian Daerah | | 21,560,000.00 | 21,560,000.00 | - |
| | Distribusi Laporan Hasil Pemeriksaan | | 10,612,000.00 | 10,612,000.00 | - |
| | Konsultasi dan Koordinasi Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | | 13,200,000.00 | 13,200,000.00 | - |
| | Rapat Koordinasi (RAKOR) Pemutakhiran Data Tindak Lanjut | | 34,020,000.00 | 34,020,000.00 | - |
| 2 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Inspektorat) | **954,056,000.00** | **402,600,000.00** | **375,600,000.00** | **27,000,000.00** |
| | **Irban I** | 181,500,000.00 | 46,500,000.00 | 46,500,000.00 | - |
| | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | | 46,500,000.00 | 46,500,000.00 | - |
| | **Irban II** | 136,200,000.00 | 89,400,000.00 | 89,400,000.00 | - |
| | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | 89,400,000.00 | 89,400,000.00 | - |
| | **Irban IV** | 389,900,000.00 | 266,700,000.00 | 239,700,000.00 | 27,000,000.00 |
| | Audit Dengan Tujuan Tertentu (Investigasi, Riksus, Pkkn & Dumas) | | 266,700,000.00 | 239,700,000.00 | 27,000,000.00 |
| | Irban | 134,256,000.00 | | | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Penugasan dan Permintaan Khusus | 112,200,000.00 | | | - |
| **III** | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | **984,240,000.00** | **388,430,100.00** | **340,430,100.00** | **48,000,000.00** |
| **A** | **Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan** | **137,756,000.00** | **78,212,100.00** | **78,212,100.00** | - |
| 1 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan (Inspektorat) | 137,756,000.00 | 78,212,100.00 | 78,212,100.00 | - |
| | Penyusunan Daftar Obyek Pemeriksaan Tahunan (DOPT) | | 36,812,100.00 | 36,812,100.00 | - |
| | Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 | | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | - |
| | Rapat Koordinasi (Saresehan antara Inspektorat Provinsi Banten dengan Inspektorat Kab/Kota se-Provinsi Banten | | 8,900,000.00 | 8,900,000.00 | - |
| | Konsultasi dan Koordinasi Ke DKI Jakarta | | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | - |
| | Penyusunan Kebijakan dan Pengawasan | | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | - |
| **B** | **Pendampingan dan Asistensi** | **846,484,000.00** | **310,218,000.00** | **262,218,000.00** | **48,000,000.00** |
| 1 | Pendampingan Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Inspektorat) | 275,160,000.00 | 200,010,000.00 | 126,060,000.00 | 73,950,000.00 |
| | Pendampingan, asistensi, Verifikasi dan Penilaian RB | | 43,950,000.00 | 6,000,000.00 | 37,950,000.00 |
| | Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas Tahun 2022 | | 156,060,000.00 | 120,060,000.00 | 36,000,000.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Inspektorat) | 571,324,000.00 | 98,208,000.00 | 98,208,000.00 | - |
| | Satgas saber pungli Provinsi Banten | | | | - |
| | ATK Saber Pungli | | | | - |
| | Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Saber Pungli di Kab/Kota Tahun 2023 | | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | - |
| | Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Saber Pungli Provinsi Banten Tahun 2023 | | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | - |
| | Pelaksanaan Rapat Tim Saber Pungli Provinsi Banten Tahun 2023 | | 80,208,000.00 | 80,208,000.00 | - |
| 3 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | | 12,000,000.00 | 37,950,000.00 | (25,950,000.00) |
| | a. Sosialisasi Pencegahan Anti Korupsi;<br>b. MCP KPK;<br>c. IEPK;<br>d. FCP;<br>e. Penegndalian Gratifikasi;<br>f. Evaluasi Benturan Kepentingan. | | 12,000,000.00 | 37,950,000.00 | (25,950,000.00) |

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program, Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Provinsi Banten

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LOKASI | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | SUMBER DANA | CATATAN PENTING | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **6** | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | **71,800,870,000.00** | | | | **72,463,972,000.00** |
| **6.01** | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | | **71,800,870,000.00** | | | | **72,463,972,000.00** |
| **6.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | ***Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%)*** | | ***100.000*** | **69,264,924,580.00** | | | | **68,118,539,000.00** |
| 6.01.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | (KP3B, BANTEN) | | 88.246.400,00 | | | | 373.279.500,00 |
| | | *Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)* | | *100.000* | | | | | |
| 6.01.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | (KP3B, BANTEN) | | 54.298.000,00 | | | | 243.190.500,00 |
| | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)* | *(KP3B, KOTA SERANG)* | *2.00* | | | | *2.00* | |
| | | *Dokumen Perencanaan Inspektorat Provinsi Banten (Dokumen)* | *(KP3B, BANTEN)* | *2* | *54.298.000,00* | *PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)* | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | (KP3B, BANTEN) | | 6.000.000,00 | | | | 17.950.000,00 |
| | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)* | *(KP3B, KOTA SERANG)* | *1.00* | | | | *1.00* | |
| | | *Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)* | *(KP3B, BANTEN)* | *1* | *6.000.000,00* | *PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)* | | | |
| 6.01.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br><br>Perubahan RKA-SKPD | | (KP3B, BANTEN) | | 6.000.000,00 | | | | 12.775.000,00 |
| | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)* | *(KP3B, KOTA SERANG)* | *1.00* | | | | *1.00* | |
| | | *Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)* | *(KP3B, BANTEN)* | *1* | *6.000.000,00* | *PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)* | | | |
| 6.01.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | (KP3B, BANTEN) | | 7.061.000,00 | | | | 12.775.000,00 |
| | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)* | *(KP3B, KOTA SERANG)* | *1.00* | | | | *1.00* | |
| | | *Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)* | *(KP3B, BANTEN)* | *1* | *7.061.000,00* | *PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)* | | | |
| 6.01.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | (KP3B, BANTEN) | | 7.061.000,00 | | | | 12.775.000,00 |
| | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)* | *(KP3B, KOTA SERANG)* | *1.00* | | | | *1.00* | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)* | *(KP3B, BANTEN)* | *1* | *7.061.000,00* | *PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)* | | | |
| 6.01.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | (KP3B, BANTEN) | | 4.208.800,00 | | | | 63.844.000,00 |
| | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)* | *(KP3B, KOTA SERANG)* | *4* | | | | *4* | |
| | | *Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)* | *(KP3B, BANTEN)* | *4* | *4.208.800,00* | *PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)* | | | |
| 6.01.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | (KP3B, BANTEN) | | 3.617.600,00 | | | | 9.970.000,00 |
| | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)* | *(KP3B, KOTA SERANG)* | *1* | | | | *1* | |
| | | *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)* | *(KP3B, BANTEN)* | *1* | *3.617.600,00* | *PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)* | | | |
| 6.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | (KP3B, BANTEN) | | 64.892.261.360,00 | | | | 64.008.292.000,00 |
| | | *Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah (%)* | | *100.000* | | | | | |
| 6.01.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | (KP3B, BANTEN) | | 64.525.391.360,00 | | | | 63.620.272.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)* | *(Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B), KOTA SERANG)* | *148* | | | | *148* | |
| | | *Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)* | *(KP3B, BANTEN)* | *148* | *64.525.391.360,00* | *PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum* | | | |
| 6.01.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas<br><br>ASN | | (KP3B, BANTEN) | | 334.470.000,00 | | | | 338.550.000,00 |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)* | *(KP3B, KOTA SERANG)* | *12* | | | | *12* | |
| | | *Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)* | *(KP3B, BANTEN)* | *12* | *334.470.000,00* | *PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)* | | | |
| 6.01.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | (KP3B, BANTEN) | | 32.400.000,00 | | | | 49.470.000,00 |
| | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)* | *(KP3B, KOTA SERANG)* | *12* | | | | *12* | |
| | | *Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)* | *(KP3B, BANTEN)* | *12* | *32.400.000,00* | *PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)* | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | (KP3B, BANTEN) | | 270.000.000,00 | | | | 480.000.000,00 |
| | | *Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah (%)* | | *100.000* | | | | | |
| 6.01.01.1.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | (KP3B, BANTEN) | | 30.000.000,00 | | | | 30.000.000,00 |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)* | *(KP3B, BANTEN)* | *12* | | | | *12* | |
| | | *Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)* | *(KP3B, BANTEN)* | *12* | *30.000.000,00* | *PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)* | | | |
| 6.01.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | (KP3B, BANTEN) | | 240.000.000,00 | | | | 450.000.000,00 |
| | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)* | *(KP3B, BANTEN)* | *100* | | | | *100* | |
| | | *Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)* | *(KP3B, BANTEN)* | *48* | *240.000.000,00* | *PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)* | | | |
| 6.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | (KP3B, BANTEN), (BANTEN) | | 650.000.000,00 | | | | 1.026.967.500,00 |
| | | *Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah (%)* | | *100.000* | | | | | |
| 6.01.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | (KP3B, BANTEN) | | 100.000.000,00 | | | | 100.000.000,00 |
| | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)* | *(KP3B, BANTEN)* | *1* | | | | *1* | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)* | *(KP3B, BANTEN)* | *1* | *100.000.000,00* | *PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)* | | | |
| 6.01.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | (KP3B, BANTEN) | | 200.000.000,00 | | | | 300.000.000,00 |
| | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)* | *(KP3B, BANTEN)* | *3* | | | | *3* | |
| | | *Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)* | *(KP3B, BANTEN)* | *3* | *200.000.000,00* | *PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)* | | | |
| 6.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | (KP3B, BANTEN) | | 150.000.000,00 | | | | 261.967.500,00 |
| | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)* | *(KP3B, BANTEN)* | *3* | | | | *3* | |
| | | *Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)* | *(KP3B, BANTEN)* | *3* | *150.000.000,00* | *PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)* | | | |
| 6.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br><br>Konsultasi SKPD | | (BANTEN) | | 175.000.000,00 | | | | 215.000.000,00 |
| | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)* | *(KP3B, BANTEN)* | *1* | | | | *1* | |
| | | *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)* | *(KP3B, BANTEN)* | *1* | *175.000.000,00* | *PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)* | | | |
| 6.01.01.1.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | (KP3B, BANTEN) | | - | | | | 25.000.000,00 |
| | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)* | *(KP3B, BANTEN)* | *1* | | | | *1* | |
| | | *Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)* | *(KP3B, BANTEN)* | *0* | | *PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)* | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | (KP3B, BANTEN) | | 25.000.000,00 | | | | 125.000.000,00 |
| | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)* | *(KP3B, BANTEN)* | *1* | | | | *1* | |
| | | *Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)* | *(KP3B, BANTEN)* | *1* | *25.000.000,00* | *PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)* | | | |
| 6.01.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | (KP3B, BANTEN) | | 98.439.520,00 | | | | 100.000.000,00 |
| | | *Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)* | | *100.000* | | | | | |
| 6.01.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | (KP3B, BANTEN) | | 98.439.520,00 | | | | 100.000.000,00 |
| | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)* | *(KP3B, BANTEN)* | *70* | | | | *70* | |
| | | *Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)* | *(KP3B, BANTEN)* | *11* | *98.439.520,00* | *PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)* | | | |
| 6.01.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | (KP3B, BANTEN) | | - | | | | - |
| | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)* | *(KP3B, BANTEN)* | *4* | | | | *4* | |
| | | *Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)* | *(KP3B, BANTEN)* | *0* | | *PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)* | | | |
| 6.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | (KP3B, BANTEN) | | 2.785.977.300,00 | | | | 1.650.000.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)* | | *100.000* | | | | | |
| 6.01.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | (KP3B, BANTEN) | | 641.462.400,00 | | | | 650.000.000,00 |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)* | *(KP3B, BANTEN)* | *12* | | | | *12* | |
| | | *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)* | *(KP3B, BANTEN)* | *12* | *641.462.400,00* | *PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)* | | | |
| 6.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | (KP3B, BANTEN) | | 2.144.514.900,00 | | | | 1.000.000.000,00 |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)* | *(KP3B, BANTEN)* | *12* | | | | *12* | |
| | | *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)* | *(KP3B, BANTEN)* | *12* | *2.144.514.900,00* | *PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)* | | | |
| 6.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | (KP3B, BANTEN) | | 480.000.000,00 | | | | 480.000.000,00 |
| | | *Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)* | | *100.000* | | | | | |
| 6.01.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | (KP3B, BANTEN) | | 80.000.000,00 | | | | 80.000.000,00 |
| | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)* | *(KP3B, BANTEN)* | *1* | | | | *1* | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)* | *(KP3B, BANTEN)* | *1* | *80.000.000,00* | *PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)* | | | |
| 6.01.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | (KP3B, BANTEN) | | 300.000.000,00 | | | | 200.000.000,00 |
| | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)* | *(KP3B, BANTEN)* | *28* | | | | *28* | |
| | | *Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)* | *(KP3B, BANTEN)* | *24* | *300.000.000,00* | *PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)* | | | |
| 6.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | (KP3B, BANTEN) | | 50.000.000,00 | | | | 100.000.000,00 |
| | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)* | *(KP3B, BANTEN)* | *120* | | | | *120* | |
| | | *Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)* | *(KP3B, BANTEN)* | *59* | *50.000.000,00* | *PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)* | | | |
| 6.01.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | (KP3B, BANTEN) | | 50.000.000,00 | | | | 100.000.000,00 |
| | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)* | *(KP3B, BANTEN)* | *1* | | | | *1* | |
| | | *Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)* | *(KP3B, BANTEN)* | *1* | *50.000.000,00* | *PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)* | | | |
| **6.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | | | | **2,195,515,320.00** | | | | **3,512,430,000.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ***Persentase ketercapaian Penyelenggaraan Pengawasan (%)*** | | ***100.000*** | | | | | |
| | | ***Persentase Jumlah Temuan yang telah ditindaklanjuti (%)*** | | ***80.000*** | | | | | |
| 6.01.02.1.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | (Provinsi Banten, BANTEN) | | 1.604.362.820,00 | | | | 2.562.264.000,00 |
| | | *Persentase ketercapaian Kegiatan penyelenggaraan Pengawasan Internal (%)* | | *100.000* | | | | | |
| 6.01.02.1.01.0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | | (Provinsi Banten, BANTEN) | | 279.930.000,00 | | | | 579.068.000,00 |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)* | *(KP3B, BANTEN)* | *2* | | | | *2* | |
| | | *Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)* | *(Provinsi Banten, BANTEN)* | *9* | *279.930.000,00* | *PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)* | | | |
| 6.01.02.1.01.0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | | (Provinsi Banten, BANTEN) | | 559.050.000,00 | | | | 1.000.000.000,00 |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)* | *(KP3B, BANTEN)* | *2* | | | | *2* | |
| | | *Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)* | *(Provinsi Banten, BANTEN)* | *13* | *559.050.000,00* | *PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)* | | | |
| 6.01.02.1.01.0003 | Reviu Laporan Kinerja | | (Provinsi Banten, BANTEN) | | 253.500.000,00 | | | | 168.350.000,00 |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)* | *(KP3B, BANTEN)* | *2* | | | | *2* | |
| | | *Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)* | *(Provinsi Banten, BANTEN)* | *11* | *253.500.000,00* | *PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)* | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01.02.1.01.0004 | Reviu Laporan Keuangan | | (Provinsi Banten, BANTEN) | | 390.162.820,00 | | | | 217.340.000,00 |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)* | *(KP3B, BANTEN)* | *2* | | | | *2* | |
| | | *Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)* | *(Provinsi Banten, BANTEN)* | *7* | *390.162.820,00* | *PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)* | | | |
| 6.01.02.1.01.0005 | Pengawasan Umum dan Teknis<br><br>Kabupaten/Kota | | (Provinsi Banten, BANTEN) | | - | | | | 100.000.000,00 |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota (Laporan)* | *(KP3B, BANTEN)* | *2* | | | | *2* | |
| | | *Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota (Laporan)* | *(Provinsi Banten, BANTEN)* | *0* | | *PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)* | | | |
| 6.01.02.1.01.0006 | Kerjasama Pengawasan Internal | | (Provinsi Banten, BANTEN) | | 86.720.000,00 | | | | 13.776.000,00 |
| | | *Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)* | *(KP3B, BANTEN)* | *2* | | | | *2* | |
| | | *Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)* | *(Provinsi Banten, BANTEN)* | *2* | *86.720.000,00* | *PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)* | | | |
| 6.01.02.1.01.0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | | (Provinsi Banten, BANTEN) | | 35.000.000,00 | | | | 483.730.000,00 |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen )* | *(KP3B, BANTEN)* | *2* | | | | *2* | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)* | *(Provinsi Banten, BANTEN)* | *2* | *35.000.000,00* | *PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)* | | | |
| 6.01.02.1.02 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | (Provinsi Banten, BANTEN) | | 591.152.500,00 | | | | 950.166.000,00 |
| | | *Persentase ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (%)* | | *100.000* | | | | | |
| 6.01.02.1.02.0001 | Penanganan Penyelesaian Kerugian<br><br>Negara/Daerah | | (Provinsi Banten, BANTEN) | | 215.552.500,00 | | | | 153.720.000,00 |
| | | *Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)* | *(KP3B, BANTEN)* | *2* | | | | *2* | |
| | | *Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)* | *(Provinsi Banten, BANTEN)* | *2* | *215.552.500,00* | *PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)* | | | |
| 6.01.02.1.02.0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | (Provinsi Banten, BANTEN) | | 375.600.000,00 | | | | 796.446.000,00 |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Laporan)* | *(KP3B, BANTEN)* | *2* | | | | *2* | |
| | | *Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Laporan)* | *(Provinsi Banten, BANTEN)* | *3* | *375.600.000,00* | *PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)* | | | |
| **6.01.03** | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | | | | **340,430,100.00** | | | | **833,003,000.00** |
| | | ***Persentase ketercapaian Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi (%)*** | | ***100.000*** | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01.03.1.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang<br>Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | | (Provinsi Banten, BANTEN) | | 78.212.100,00 | | | | 161.177.250,00 |
| | | *Persentase ketercapaian Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan (%)* | | *100.000* | | | | | |
| 6.01.03.1.01.0001 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang<br><br>Pengawasan | | (Provinsi Banten, BANTEN) | | 78.212.100,00 | | | | 161.177.250,00 |
| | | *Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)* | *(KP3B, BANTEN)* | *4* | | | | *4* | |
| | | *Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)* | *(Provinsi Banten, BANTEN)* | *4* | *78.212.100,00* | *PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)* | | | |
| 6.01.03.1.02 | Pendampingan dan Asistensi | | (Provinsi Banten, BANTEN) | | 262.218.000,00 | | | | 671.825.750,00 |
| | | *Persentase ketercapaian Kegiatan Pendampingan dan Asistensi (%)* | | *100.000* | | | | | |
| 6.01.03.1.02.0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan<br><br>Penilaian Reformasi Birokrasi | | (Provinsi Banten, BANTEN) | | 126.060.000,00 | | | | 138.240.000,00 |
| | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)* | *(KP3B, BANTEN)* | *20* | | | | *25* | |
| | | *Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)* | *(Provinsi Banten, BANTEN)* | *16* | *126.060.000,00* | *PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)* | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01.03.1.02.0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | | (Provinsi Banten, BANTEN) | | 98.208.000,00 | | | | 483.585.750,00 |
| | | *Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)* | *(KP3B, BANTEN)* | *5* | | | | *5* | |
| | | *Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)* | *(Provinsi Banten, BANTEN)* | *1* | *98.208.000,00* | *PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)* | | | |
| 6.01.03.1.02.0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi<br><br>Penegakan Integritas | | (Provinsi Banten, BANTEN) | | 37.950.000,00 | | | | 50.000.000,00 |
| | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Perangkat Daerah)* | *(KP3B, BANTEN)* | *1.00* | | | | *1.00* | |
| | | *Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Perangkat Daerah)* | *(Provinsi Banten, BANTEN)* | *3* | *37.950.000,00* | *PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)* | | | |
| | | | | | | | | | |
| **J U M L A H** | | | | | **71.800.870.000,00** | | | | 72.463.972.000,00 |

# BAB IV
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Banten, serta untuk melaksanakan strategi dan kebijakan melalui beberapa program dan kegiatan. Adapun Program dan Kegiatan pada tahun 2024 Inspektorat Daerah Provinsi Banten berpedomanan pada nomenlatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenlatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pendanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Banten pada Tahun 2024, seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1 Pendanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Banten pada Tahun 2024

| TUJUAN | SASARAN DAERAH / SASARAN PERANGKAT DAERAH | PROGRAM/KEGIATAN | Data Capaian pada awal tahun Perencanaan (%) | Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024 | | Unit Kerja OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET | PAGU | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | **71,800,870,000** | **INSPEKTORAT DAERAH** |
| Tujuan PD : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah | Sasaran PD : Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** | | **100%** | **69,264,924,580** | |
| | | **Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | **100%** | **88,246,400** | |
| | | Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | 2 Dok | 54,298,000 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | 1 Dok | 6,000,000 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | 1 Dok | 6,000,000 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | 1 Dok | 7,061,000 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | 1 Dok | 7,061,000 | |
| | | Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | 4 Lap | 4,208,800 | |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 1 Dok | 3,617,600 | |
| | | **Administrasi Keuangan Perangkat daerah** | | **100%** | **64,892,261,360** | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tujangan ASN | | 148 Orang/ Bulan | 64,525,391,360 | |
| | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | 12 Dok | 334,470,000 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | 12 Lap | 32,400,000 | |
| | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | **100%** | **270,000,000** | |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | - | 0 | |
| | | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | 12 Dok | 30,000,000 | |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | 100 Org | 240,000,000 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | **100%** | **650,000,000** | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | 1 paket | 100,000,000 | |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | 3 paket | 200,000,000 | |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | 3 paket | 150,000,000 | |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | 1 Lap | 175,000,000 | |
| | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | 1 Dok | 25,000,000 | |
| | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | **100%** | **98,439,520** | |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | 70 Unit | 98,439,520 | |
| | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **100%** | **2,785,977,300** | |
| | | Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | 12 Lap | 641,462,400 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | 12 Lap | 2,144,514,900 | |
| | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **100%** | **480,000,000** | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | 1 Unit | 80,000,000 | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | 28 Unit | 300,000,000 | |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | 120 Unit | 50,000,000 | |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | 1 Unit | 50,000,000 | |
| Tujuan PD : Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Sasaran PD : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | **Program Penyelenggaraan Pengawasan** | | **80%**<br>**100%** | **2,195,515,320** | |
| | | **Penyelenggaraan Pengawasan Internal** | | **100%** | **1,604,362,820** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | | 2 Lap | 279,930,000 | |
| | | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | | 2 Lap | 559,050,000 | |
| | | Reviu Laporan Kinerja | | 2 Lap | 253,500,000 | |
| | | Reviu Laporan Keuangan | | 2 Lap | 390,162,820 | |
| | | Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota | | 2 Lap | 390,162,820 | |
| | | Kerjasama Pengawasan Internal | | 2 Lap | 86,720,000 | |
| | | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | | 2 Lap | 35,000,000 | |
| | | **Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu** | | **100%** | **591,152,500** | |
| | | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | | 2 Lap | 215,552,500 | |
| | | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | | 2 Lap | 375,600,000 | |
| | Sasaran PD : Meningkatnya Pembangunan Zona | **Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi** | | **100%** | **340,430,100** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Integritas (ZI) pada Unit Kerja pelayanan publik menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) | **Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan** | | **100%** | **78,212,100** | |
| | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | | 4 rekom | 78,212,100 | |
| | | **Pendampingan dan Asistensi** | | **100%** | **262,218,000** | |
| | | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | | 20 OPD | 126,060,000 | |
| | | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | | 5 Kegiatan | 98,208,000 | |
| | | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | | | 37,950,000 | |

# BAB V
# PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2023 disusun dengan menjabarkan Kebijakan dan Program Renstra Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2023-2026 ke dalam kegiatan, dalam rangka mendukung Prioritas Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

Kebijakan yang ditetapkan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2023, selanjutnya dijabarkan dalam 3 (tiga) Program antara lain :

a. Program Penunjang Umum Pemerintah Daerah;
b. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
c. Program Perumusan Kebijakan Pemdampingan dan Asistensi

Berdasarkan Kebijakan dan Program yang telah ditetapkan, selanjutnya diimplementasikan kedalam 11 (Sebelas) rencana kegiatan yang disusun dengan prinsip anggaran berbasis kinerja dimana kegiatan disusun berdasarkan tolok ukur dan target kinerja serta menjelaskan lokasi dan indikasi anggaran

Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi program dan kegiatan Tahun 2022 dan 2023 serta penjabaran dari isu dan permasalahan yang ada, diantaranya :

a. Penyelesaian pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Eksternal Pemerintah (APEP) maupun Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) terhadap satuan Organisasi Perangkat Daerah belum maksimal.
b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia di lingkungan Inspektorat Provinsi Banten yang memiliki latar belakang pengalaman di bidang pengawasan.
c. Kebijakan penyelenggaraan pengawasan terhadap azaz dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat belum berjalan efektif.

d. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah dibuat sering mengalami perubahan jadwal pelaksanaan.
e. Belum adanya sinkronisasi Program Kerja Pengawasan antara BPKP dengan Inspektorat Daerah Provinsi Banten.

Serang, Juli 2023

**Plt. INSPEKTUR DAERAH**
**PROVINSI BANTEN,**

**Dr. Ir. MOCH. TRANGGONO, M.Sc.**
**NIP. 19631210 199003 1 005**